



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21005 Fax (0756) 22107

Laman : <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id> Posel: bpkpad@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 900/7/BPKPAD/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANATEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. Untuk tertibnya pengelolaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/27/Kpts/BPT-PS/2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada poin a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Sarolangon-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA

1. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut:
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD, meliputi :
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen

pelaksanaan kegiatan.

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- II. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terkait dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :
1. Menyiapkan Dokumen rangka Pelaksanaan Anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksana Kegiatan / Sub Kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan / Sub Kegiatan Kepada PA/KPA.

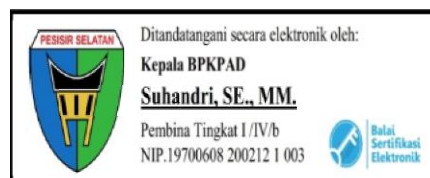
KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Penyediaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2026



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bagian Pembangunan Sekda Kab.Pesisir Selatan
4. Kabid dilingkungan BPKPAD Kab.Pesisir Selatan
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 900/7/BPKPAD/2026

TANGGAL : 14 Januari 2026

TENTANG : PENUNJUKAN PERUBAHAN APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI PEJABAT PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
I	SEKRETARIAT				
1.	RIO PRATAMA, A. Md NIP. 19870420 201101 1 004	Penata / III c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Adminlstrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penataan Arsip Dinamis Pada SKPD 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Fasilitas Kunjungan Tamu 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
				Lapangan	
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Adminlstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				2. Pengadaan Mebel	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
II	ANGGARAN				
2.	RAHAYU KURNIA PUTRI SE M.Si NIP.19871116 200604 2 002	Penata Tk. I / III d	Perencana Ahli Muda		
1.	WIDYANTORO, S.Pi NIP.19811021 200501 2 003	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
				1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 4. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Kabupaten/Kota	
2.	RENI DAHLIA, SE NIP.19730130 200701 2 004	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Penyusunan Anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
3.	HALIFAH MARYENTI, SE NIP.19800913 201407 2 004	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
III	PERBENDAHARAAN				
1.	GUSTINI, SE, MM, Ak NIP. 19760805 200012 2 002	Pembina / IV a	Kasubbid Perbendaharaan dan Verifikasi	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	FITRI HANDAYANI, A.Md NIP. 19810803 200501 2 006	Penata Tk. I / DII d	Kasubbid Pengelolaan Kas Umum Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 2. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Admhlstrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
3.	LUSIANA, S.Kom, MM NIP. 19810406 200902 2 005	Penata Tk. I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 1. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
IV AKUNTANSI DAN BINA KEUANGAN					
1.	ELZA NILAWATI, SE NIP.19831227 200902 2 005	Penata / III c	Kasubbid Akuntansi dan Pembukuan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 2. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
2.	WETRI MULYADEVITA' A Md NIP.19800708 200902 2 003	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbid Bina Keuangan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kab/Kota	
3.	RAHMI HAMDA SARI, S.St NIP.19850921 200501 2 002	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
V BARANG MILIK DAERAH					
1.	ROSZA LESTARI, SE NIP.19780920 200701 2 007	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan BMD	Program Pengelolaan Barang Milk Daerah Pengelolaan Barang Milk Daerah 1. Penyusunan Standar Harga	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1		3	4	5	6
				2. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
				3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.	FERI CANDRA, S.Kom NIP.19840212 200604 1 004	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				1. Penatausahaan Barang Milik Daerah	
				2. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
3.	MUHAMMAD ZAKI. E. MM, SE NIP.19821030 201502 1 002	Penata / III c	Kasubbid Pengamanan dan Pemanfaatan BMD	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				1. Pengamanan Barang Milik Daerah	
				2. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
VI					
1.	MIRA HERSANTI, SE, MM NIP.19790727 200902 2 001	Penata Tk. I / III d	Kasubbid Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
				2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
				3. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	
2.	APRINI, SE NIP.19740325 200701 2 006	Penata / III c	Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Pembinaan dan Pengawasan Pengeluaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
				2. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1		3	4	5	6
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
				1. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
3.	MELI ETRI YENI, SE NIP. 19750718 200701 2 006	Penata / III c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
				2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
VII	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				
1.	NOVIARDI, SE NIP. 19691107 200604 1 003	Penata Tk. I / III d	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
2.	ANDREAS ADITYA, SS NIP. 19861206 201002 1 001	Penata / III c	Kasubbid Pendapatan Daerah dan Lainnya	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	
				2. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
3.	RAMEITA FISKA LINGSIH, SH	Penata Muda Tk. I / III b	Kasubbid PBB dan BPHTB	Pogram Pengelolaan Pendapatan Daerah	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DIKELOLA	KET
1	2	3	4	5	6
	NIP. 19860522 201903 2 001			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	
				1. Penagihan Pajak Daerah	
				2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				3. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala BPKPAD
Suhandri, SE., MM.
Pembina Tingkat I/IV/b

